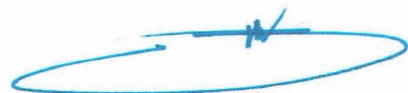


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggungjawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2019. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Pelaihari, 31 Januari 2020

I n s p e k t u r,



H. Sutrisno, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601128 198202 1 003

1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
C. Produk dan Layanan	4
D. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan	6
D. Sasaran Strategis	7
E. Tabel(Tujuan,Indikator,Target,Sasaran,Indikator Target 5 Tahun)	9 12
F. Indikator Kinerja Utama	12
G. Program dan Kegiatan	14
H. Perjanjian Kinerja 2019	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	18
1. Target dan Capaian IKU	18
2. Uraian dan Analisa Capaian IKU	19
B. Capain Sasaran Strategis	22
1. Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target	22
2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis	23
3. Uraian dan analisa Capaian Sasaran Strategis	25
C. Akuntabilitas Keuangan	47
1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019	47
- Belanja Tidak Langsung	47
- Belanja Langsung	48

BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Strategi Peningkatan Kerja	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2019
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2013-2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 dan berbagai capaian strategis tercemin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategic dengan 14 (empat belas indikator). Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 6 program dan 31 kegiatan dan secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2019 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan. Terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tidak mencapai target, dan kedepan pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan lebih ditingkatkan.

Pencapaian target kinerja merupakan gambaran bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pembinaan pengawasan yang merupakan komitmen bersama atas keterlibatan secara aktif dari seluruh unsur APIP, Pimpinan dan semua SKPD dalam rangka meningkatkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tetapi capaian kinerja tahun 2019 masih perlu peningkatan terutama dukungan para APIP dalam rangka penguatan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal yang diharapkan semakin profesional dan kompeten serta mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi, mampu berperan sebagai motivator dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menjadi inisiator, kreator dan inovator perubahan bagi lingkungannya sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal tersebut, maka sasaran program/kegiatan tahun 2019 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya berupa konsultasi, asistensi dan sosialisasi untuk mewujudkan tatakelola yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk dapat

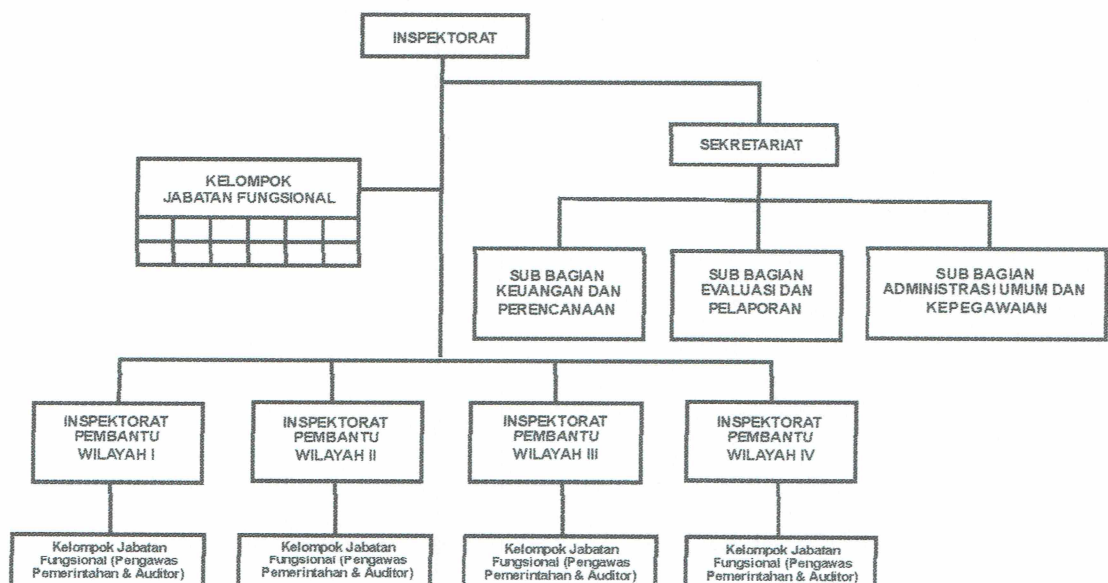
tekad seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI (Bagan SOTK)

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur bertanggungjawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur didukung oleh 1 Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu, 3 orang Kasubbag dan Jabatan Fungsional Auditor serta Jabatan Fungsional P2UPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT



C. PRODUK LAYANAN (HASIL PRODUK LAYANAN SKPD SESUAI TOPOKSI}

Sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat dan peran APIP yaitu sebagai *quality assurance* dan *consulting*, maka kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya melalui :

1. Pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit barang/jasa, reviu laporan keuangan pemerintah daerah, serta evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan reviu RKA-SKPD & RKA PPKD;
2. Pengawasan pengaduan masyarakat/instansi;
3. Tindak lanjut temuan hasil pengawasan; dan
4. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
5. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
6. Pemberian rekomendasi *blacklist* kepada penyedia jasa;
7. Pemberian bimbingan teknis serta konsultasi;
8. Reviu Revormasi Birokrasi;
9. Reviu atas pemerapan Maturitas SPIP di Kabupaten Tanah Laut;
10. Pemberian Jasa Konsultasi dan fasilitasi.

Dari kegiatan tersebut diharapkan SKPD dapat meningkatkan kinerja organisasinya serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian /lembaga /pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri /Pimpinan Lembaga /gubernur /bupati /walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, kini tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/4358/ORG tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Produk dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan

H. Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 1. Target dan Capaian IKU
 - 2. Uraian dan Analisa Capaian IKU
- B. Capaian Sasaran Strategis
 - 1. Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target
 - 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 - 3. Uraian dan analisa Capaian Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019
 - Belanja Langsung
 - Belanja Tidak Langsung

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2019
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan (1-4)
- 6. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2013 – 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi (menyesuaikan dengan Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut)

B. Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi RPJMD yang ke 3, yaitu : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** (menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut)

C. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja terhadap indikator- indikator Inspektorat sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Inspektorat Tahun 2019

Rumusan tujuan sebagaimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien
3. Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai;

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran Renstra
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran strategis		Indikator kinerja	Target
				ESELON 2			
1	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase SKPD dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik	100%	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	1	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	2	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2
				SELON 3 (IRBAN)			
		Persentase kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan Keuangan sesuai standar	100%	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	1	Persentase tercapainya PKPT	100%
					2	Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
				Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	1	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti : - Internal - Eksternal	70 %
				Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1	Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%
					2	Persentase SKPD dengan	100%

						hasil reuiu ZI baik	
				ESELON 3 (SEKRETARIS)			
2	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan adaministrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100%	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%
					2	Perentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%
				Meningfktnya kualitas Perencanaan dan Pelaopran	1	Predikat Sakip	BB
3	Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai	Persentase meningkatnya kompetensi pengawas pemerintahan, auditor dan pegawai lainnya	100%	Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan	1	Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat	100%
					2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
					3	Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan	100%

E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun)

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja pd awal periode RPJMD	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase SKPD dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik	100%	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat keuangan	40 SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya material	5%	5%	5%	5%	7%	7% dari hasil SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya keuangan
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP, SKPD dengan Skor Baik	Level 3,1	Lefel 3,2	Lefel 3,3	Lefel 3,4	Lefel 3,5	Lefel 3,5	
				Persentase Kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan Keuangan sesuai standar	100%	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	80%	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	8 aduan masyarakat (100%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Semua aduan masyarakat ditangani 100%

2	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100%	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan kategori tuntas ditindaklanjuti - eksternal - Internal	Jumlah rekomendasi yang belum tuntas di TL : 698	70%	72%	75%	80%	85%	
					Meningkatnya hasil Evaluasi RB dan ZI SKPD	Persentase SKPD dengan hasil revidi RB baik	CC (Memadai)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Baik
						Persentase SKPD dengan hasil revidi ZI baik	Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Baik
					Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
						Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
					Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Predikat SAKIP	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	BB

3	Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai	Peningkatan kompetensi pengawas pemerintahan, auditor dan pegawai lainnya	100%	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat	10 orang	10	10	10	10	10	10	40 org
					Tingkat I kapabilitas APIP	2+ hasil penilaian BPKP	Lefel 3	Lefel 3	Lefel 3	Lefel 3	Lefel 3	Lefel 3	
					Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Semua perencanaan diklat terealisasi

F. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang telah dirumuskan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra Tahun 2018-2023 adalah berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase menurunnya Temuan hasil pengawasan bersipat keuangan	$\frac{\sum \text{Temuan temuan keuangan th } n-1 \text{ (Th } n-1)}{\sum \text{Temuan SKPD diperiksa th } n} \times 100\%$	Inspektur, Irban, Subbag Perencanaan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	$\frac{\sum \text{SKPD dengan Maturitas SPIP minimal } *3.0*}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Inspektur, Irban, Subbag Perencanaan, Subbag Evlap, Subbag Administrasi Umum

G. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan jasa alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

9. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
 11. Penyediaan makanan dan minuman
 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
 14. Penyediaan jasa penunjang SKPD
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
 4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Oparasional
- 3) Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 4) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG)
1. Evaluasi Asistensi Sistim Akuntabilitas Kinerja SKPD
 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
 3. Saber Pungli
 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Pelaksanaan Pengawan Internal secara berkala
 2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah
 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan
 4. Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan
 5. Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan
6. Program Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1. Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

H. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 yang telah disepakati baik oleh Inspektur, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

ESSELON II (INSPEKTUR)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentasi Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	100%

ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	- Persentase tercapainya PKPT - Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	 100% 100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	1. Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti • Internal • Eksternal	70%
4	Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1. Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik 2. Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100% 100%

ESSELON III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu 2. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100% 100%
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan	1. Predikat SAKIP	A
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	1. Persentase Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat 2. Tingkat Kapasitas APIP 3. Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100% Level 3 100%

ESSELON IV (KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan	1. Jumlah Temuan yang di Inventarisasi	550 Temuan
2	Melaksanakan fasilitasi Kormonev Pencegahan Korupsi	2. Jumlah Korsugah Korupsi yang difasilitasi	2 Kali
3	Melaksanakan Fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli	3. Jumlah kegiatan Satgas Saber Pungli yang difasilitasi	7 Kali

4	Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	4. Jumlah temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindak Lanjuti (Eksternal dan Internal)	550 Temuan
5	Melaksanakan Evaluasi berkala temuan Pengawasan	5. Jumlah temuan hasil Pengawasan yang dievaluasi	1000 Temuan
6	Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	6. Jumlah kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang difasilitasi	8 kali
7	Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	7. Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	29 SKPD
8	Melaksanakan fasilitasi Reviu barang/jasa	8. Jumlah reviu pengadaan barang/jasa yang dilakukan terhadap SKPD	80 kali
9	Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Kapabilitas APIP	9. Jumlah Elemen Penilaian Kapabilitas APIP	6 elemen

ESSELON IV (KASUBAG ADMINISTRASI UMUM)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melakukan layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	10 buah
2	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	28 buah
3	Melaksanakan Pemeliharaan Saprasi,	Jumlah Saprasi, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	445 buah
4	Melaksanakan Pengelolaan Arsip	Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	2250 buah
5	Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat	20 org

ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dokumen
2.	Melaksanakan Fasilitas PKPT	Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT	75 LHP
3.	Melaksanakan Fasilitas reviu LKPD	Laporan Hasil Reviu LKPD Sesuai SAP	1 Dok
4.	Melaksanakan Fasilitas Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	40 Dokumen
5.	Melakukan Fasilitasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi	6 Kasus
6.	Melaksanakan Fasilitas Evaluasi RB ZI	Jumlah SKPD yang dievaluasi RB dan ZI	ZI 10 RB 10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2019.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Target dan Capaian IKU (Tabel)

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut No : 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 November 2019 yang telah dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi, dan Target dan Capaian IKU adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	Kinerja Utama/Outcome/ Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase menurunnya Temuan hasil pengawasan bersipat keuangan	$\frac{\sum \text{Temuan temuan keuangan th n -1 (Th n-1)}}{\sum \text{Temuan SKPD diperiksa th n}} \times 100\%$	Inspektur, Irban, Subbag Perencanaan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	$\frac{\sum \text{SKPD dengan Maturitas SPIP minimal } *3.0*}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Inspektur, Irban, Subbag Perencanaan, Subbag Evlap, Subbag Administrasi Umum

Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	160,24%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentasi Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2	98,75%

3. Uraian dan Analisa Capaian IKU

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Kabuapten Tanah Laut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan

Indikator : Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan

Pada Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 sebanyak 40 SKPD/ obrik, yang terdiri atas 29 Badan, Dinas dan Kantor dan 11 Kecamatan serta 5 Kelurahan, juga 130 Desa dan Solah di 11 Kecamatan. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 332 kejadian atau dengan Nilai Rupiah sebesar Rp. 4,336,605,402,70

Sedangkan untuk Tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut telah dilaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT Tahun 2019 sebanyak 102 Desa dari 130 Desa, dan 1 SKPD.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	8,12%	160,24%

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tahun 2019 terdapat temuan yang bersifat keuangan sebanyak 266 kejadian atau dengan total nilai sebesar 8.276.537.188,91. sehingga mengalami penurunan sebesar 66 kejadian atau (8,12%), artinya indikator ini tercapai melebihi target. Jumlah temuan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan pengelolaan APBDesa di 130 Desa, sedangkan untuk SKPD kedepan dilakukan pemeriksaan Kinerja.

Kendala-kendala dalam mencapai target Indikator ini antara lain :

Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah obrik sehingga untuk SKPD tahun 2019.

Solusi :

- 1) Membuat Peta Pengawasan berdasarkan Penilaian Berbasis Resiko dari SKPD.
- 2) Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
- 3) Dilaksanakan entry briefing dengan obrik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator : Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan Sub Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2	3,16	98,75%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Implementasi Maturitas SPIP Kabupaten Tanah Laut pada 2018 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan penilaian Maturitas SPIP di 9 SKPD (Inspektorat, Setda, Bappeda, BKPSDM, PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKAD) dan telah mencapai target nilai rata-rata 3,734 atau dengan katagori *TERDEVINISI*. Sedangkan hasil oleh BPKP Pusat mendapat nilai 3,16 artinya bahwa Kabupaten Tanah Laut telah melakukan SPIP dengan baik.

Tabel Hasil Nilai Maturitas SPIP Tahun 2018

SKPD	Nilai
Bappeda	3,777
DPM dan PTSP	3,702
PUPR	3,702
BPK	3,717
BPKAD	3,740
Dinas Kesehatan	3,740
Inspektorat	3,717
SETDA	3,777
Dinas Pendidikan	3,740
Nilai Rata-rata	3,734

Sedangkan untuk Tahun 2019 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp 202.220.700,00 Realisasi Rp.34.854.000,00 Atau 17,24 %.

Pada Tahun 12019 untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan pengumpulan data Penilaian Resiko di 29 SKPD tetapi belum dilakukan penilaian, karena penilaian akan dilakukan di Tahun 2020. Dari hasil pengumpulan data Penilaian Resiko SKPD telah terealisasi sebanyak 23 SKPD atau 79,3% sedangkan yang belum 6 SKPD.

Dalam penilaian difokuskan terhadap 5 (lima) unsur, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Resiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penerapan pengendalian yang dilakukan SKPD untuk :

- a) mendorong pengelolaan APBD sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) menurunkan potensi tindak korupsi;
- c) perbaikan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah.

Kendala-kendala dalam mencapai target Indikator ini antara lain :

Lambatnya penyampaian data penilaian Resiko dari SKPD.

Solusi :

1. Dilakukan koordinasi terkait penyampaian data SKPD.
2. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, maka perlunya menyamakan persepsi antara evaluator dengan SKPD terkait data yang akan dijadikan penilaian.
3. Akan dilakukan pendampingan dalam rangka penilaian dengan BPKP Perwakilan Prov. Kalsel.

Rencana Aksi

- Penyusunan Perencanaan Pengawasan berbasis Resiko (PPBR)

B. Capaian Sasaran Strategis.

Sesuai dengan Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sasaran Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
ESSELON II (INSPEKTUR)				
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	8,12%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2	3,16%
ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU)				
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	1. Persentase tercapainya PKPT	100%	93,56%
		2. Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib.	100%	100%

2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	1. Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti • Internal • Eksternal	70% 70%	55,25% 90,92%
4	Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1. Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik 2. Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100% 100%	0% 100%
ESSELON III (SEKRETARIS)				
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%	100%
		2. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP	BB	A
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	1. Persentase Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	100%	84%
		2. Tingkat Kapasitas APIP	Level 3	2 (66,67)
		3. Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100%	75%

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
ESSELON II (INSPEKTUR)					
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	1. Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	8,12%	162%

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2	3,16	98,75%
ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU)					
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	1. Persentase tercapainya PKPT	100%	93,56%	93,56%
		2. Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	1. Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti • Internal • Eksternal	70% 70%	38,67% 63,64%	55,25% 90,92%
4	Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1. Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%	0%	0%
		2. Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%	100%	100%
ESSELON III (SEKRETARIS)					
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan	1. Predikat SAKIP	BB	A	115%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	1. Persentase Pemenuhan SDM Pengawasan yang	100%	84%	84%

		bersertifikat			
		2. Tingkat Kapasitas APIP	Level 3	2	66,67%
		3. Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100%	75%	75%

3. Uraian dan analisa Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1. Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan

Indikator I. : Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan

Pada Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 sebanyak 40 SKPD/ obrik, yang terdiri atas 29 Badan, Dinas dan Kantor dan 11 Kecamatan serta 5 Kelurahan, juga 130 Desa dan Solah di 11 Kecamatan. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 332 kejadian atau dengan Nilai Rupiah sebesar Rp. 4,336,605,402,70

Sedangkan untuk Tahun 2019 untuk mencapai indikator tersebut telah dilaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT Tahun 2019 sebanyak 102 Desa dari 130 Desa, dan 1 SKPD. Indikator tersebut didukung melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp.810.714.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 497.971.300,00 atau 61.42%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	8,12%	160,24%

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tahun 2019 terdapat temuan yang bersifat keuangan sebanyak 266 kejadian atau dengan total nilai sebesar 8.276.537.188,91. sehingga mengalami penurunan sebesar 66 kejadian atau (8,12%), artinya indikator ini tercapai melebihi target. Jumlah temuan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan pengelolaan APBDesa di 130 Desa, sedangkan untuk SKPD kedepan dilakukan pemeriksaan Kinerja.

Kendala :

Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah obrik sehingga untuk SKPD tahun 2019.

Solusi :

- 1) Membuat Peta Pengawasan berdasarkan Penilaian Berbasis Resiko dari SKPD.
- 2) Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
- 3) Dilaksanakan entry briefing dengan obrik.

Kendala :

1. Melakukan penyusunan Peta pengawasan berbasis Resiko dari SKPD.
2. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah obrik sehingga untuk SKPD tahun 2019 hanya satu SKPD saja dilakukan pemeriksaan, yakni memberi kesan khusus kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

Sasaran 2. : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator I. Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan Sub Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,2	3,16	98,75%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Implementasi Maturitas SPIP Kabupaten Tanah Laut pada 2018 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan penilaian Maturitas SPIP di 9 SKPD (Inspektorat, Setda, Bappeda, BKPSDM, PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPKAD) dan telah mencapai target nilai rata-rata 3,734 atau dengan katagori *TERDEVINISI*. Sedangkan hasil oleh BPKP Pusat mendapat nilai 3,16 artinya bahwa Kabupaten Tanah Laut telah melakukan SPIP dengan baik.

Tabel Hasil Nilai Maturitas SPIP Tahun 2018

SKPD	Nilai
Bappeda	3,777
DPM dan PTSP	3,702
PUPR	3,702
BPK	3,717
BPKAD	3,740
Dinas Kesehatan	3,740
Inspektorat	3,717
SETDA	3,777
Dinas Pendidikan	3,740
Nilai Rata-rata	3,734

Sedangkan untuk Tahun 2019 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan total anggaran sebesar Rp 202.220.700,00 Realisasi Rp.34.854.000,00 Atau 17,24 %.

Pada Tahun 12019 untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan pengumpulan data Penilaian Resiko di 29 SKPD tetapi belum dilakukan penilaian, karena penilaian akan dilakukan di Tahun 2020. Dari hasil pengumpulan data Penilaian Resiko SKPD telah terealisasi sebanyak 23 SKPD atau 79,3% sedangkan yang belum 6 SKPD.

Dalam penilaian difokuskan terhadap 5 (lima) unsur, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Resiko;
- 3) Kegiatan pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penerapan pengendalian yang dilakukan SKPD untuk :

- a) mendorong pengelolaan APBD sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) menurunkan potensi tindak korupsi;
- c) perbaikan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah daerah.

Kendala-kendala dalam mencapai target Indikator ini antara lain :

Lambatnya penyampaian data penilaian Resiko dari SKPD.

Solusi :

1. Koordinasi lebih intensip dengan SKPD terkait data untuk Penilaian Resiko
2. Pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, maka perlunya menyamakan persepsi antara evaluator dengan SKPD terkait data yang akan dijadikan penilaian.
3. Akan dilakukan pendampingan dalam rangka penilaian dengan BPKP Perwakilan Prov. Kalsel.

Rencana Aksi

- Penyusunan Perencanaan Pengawasan berbasis Resiko (PPBR)
- Mengikutsertakan Tim untuk Diklat Berbasis Resiko di BPKP

Sasaran 3. Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala dengan anggaran sebesar 1.197.064.056.- dan terealisasi sebesar Rp912.826.624,- atau 76,3%.

Sedangkan Tahun 2019 , untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan anggaran sebesar Rp.810.714.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 497.971.300,00 atau 61.42%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 (dua) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase tercapinya PKPT.
- 2) Persentase SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	1	Persentase tercapinya PKPT	100%	80,89	80,89
	2	Persentase SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib	100%	100	100

Indikator 1 : Persentase tercapinya PKPT

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran indikator tersebut adalah melakukan pengawasan melalui pemeriksaan/audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya. Berdasarkan hasil capaian sampai dengan triwulan IV Tahun 2019 jumlah PKPT yang dapat direalisasikan sebesar 80,89% (dari 190 obrik yang direalisasikan 154 Obrik)

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana PKPT yang telah diterbitkan pada Tahun 2019, yaitu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi Pengawasan Administrasi Umum Pengawasan Urusan Pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 pada Badan/ Dinas, Kecamatan serta Kelurahan juga Desa. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 90 buah dengan jumlah rekomendasi sebanyak 763 buah, dengan rekomendasi yang bersifat keuangan sebanyak 266 buah dan yang bersifat administrasi sebanyak 497 buah. dengan Total Nilai RP8.276.537.188.91

Tabel Realisasi PKPT 2019

Jumlah Obrik	Realisasi	Capaian
130 Desa	101 Desa	77,69%
20 SKPD	13 SKPD	65%
40 Reviu	40 Reviu	100%
Jumlah	154	80,89

Berdasarkan target bahwa capaian PKPT tahun 2019 tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini terkait pengawasan dalam rangka pembinaan pada

pemerintahan desa. Meskipun LHP telah terbit melebihi target tetapi masih terdapat SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana PKPT, berikut table hasil capaian LHP Tahun 2019.

Tabel hasil PKPT

Jumlah PKPT	Jumlah LHP terbit	Capaian
75	90	120%

Sumber data : umum, 2019



Kegiatan cek fisik lapangan, 2019



Kegiatan ekspose temuan hasil pengawasan

Dari tabel tersebut bahwa capaian Laporan Hasil Pemeriksaan melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini terkait laporan hasil pembinaan pada pemerintahan desa. Meskipun LHP telah terbit melebihi target tetapi masih terdapat SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana PKPT.

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

sasaran ini adalah

- Banyaknya kegiatan tambahan yang tidak masuk dalam PKPT sehingga program yang semestinya ke SKPD menjadi terhambat.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
- Memasukan kegiatan Tambahan ke PKPT tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Penyusunan PPBR SKPD untuk PKPT berbasis Resiko.

Indikator 2 : Persentase SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib.

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala dengan sub kegiatan Reviu LKPD dengan anggaran sebesar Rp67.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp67.930.000,- atau 100%. Dalam rangka mendukung Opini atas kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, maka SKPD membuat Laporan Keuangan sesuai Standar SAP dan SPI. Sesuai dengan hasil kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan terhadap 40 SKPD sebagai entitas Pelaporan, maka pengelolaan keuangan dan aset yang SKPD tertib, sehingga laporan Keuangan SKPD telah tercapai 100% sesuai dengan Standar.

Sedangkan Tahun 2019 untuk melaksanakan indikator ini telah dilakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan terhadap 40 SKPD sebagai entitas Pelaporan, didukung melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan sub kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan anggaran sebesar Rp.810.714.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 497.971.300,00 atau 61.42%. Dalam kurun 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini atas kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut tabel opini BPK–RI atas pengelolaan Keuangan Pemerintah selama kurun waktu 6 (enam) tahun :

Tabel perolehan opini BPK-RI

Tahun	Opini
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber data, evlap, 2019



Kegiatan reviu LKPD, 2019

Dalam rangka melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah daerah dengan data pendukung laporan keuangan SKPD. Dari kegiatan tersebut terealisasi 100% bahwa pengelolaan keuangan dan aset di SKPD tertib sesuai standar dan dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut tabel reviu terhadap SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib.

Tabel SKPD

Jumlah SKPD/ kelurahan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan Aset	Capaian (%)
29 Badan / Dinas	29	29	100
11 Kecamatan	11	11	100
5 Kelurahan	5	5	100
Jumlah	45	45	100

Sumber data : hasil reviu, 2019

Sasaran 4. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala melalui Sub Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya dengan anggaran sebesar Rp65.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp38.355.000,- atau 59%. Pada Tahun 2018 pengaduan masyarakat dan realisasi 4 (empat) atau 66,7% dan telah ditindaklanjuti semua (100%).

Sedangkan Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dengan Pagu anggaran Rp. 26.979.500.00,- dengan realisasi Rp. 1.837.500.00,- (6.81%). Kegiatan Kasus yang masuk ada 2 dan telah ditindaklanjuti semua (100%).

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100 (2) buah	100%

Dalam rangka penyelesaian tersebut rekomendasi telah disampaikan ke SKPD terkait yang akan digunakan sebagai dasar Pertimbangan Majelis. Dan Inspektorat telah memantau terkait tindak lanjut tersebut, dari hasil rekomendasi tersebut yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.



Kegiatan riksus, 2019

Sasaran 5. Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran sebesar 287.146.700 dan terealisasi sebesar Rp. 154.836.600 atau 53,92%;

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan Pagu anggaran Rp. 140.416.100.00,- dengan realisasi Rp. 54.357.000.00,- (38.71%) Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti yaitu Internal dan Eksternal.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti • Internal • Eksternal	70%	38,67% 63,64%	55,25% 90,92%

Berdasarkan hasil kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan baik atas temuan pengawas internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

a) Eksternal

Hasil penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan Eksternal tahun 2019 berdasarkan Statistik Rekomendasi sebanyak 63% dari jumlah total temuan 44 buah rekomendasi yang terdiri dari :

1. Sesuai 5
2. Belum Sesuai 23
3. Belum ditindak lanjuti 16

b) Internal

Dari hasil pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 terdapat rekomendasi sebanyak 763 buah, yang telah tuntas ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 295 buah, atau sebesar 38%, sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 468 buah atau 61%,

Tabel penyelesaian hasil pemeriksaan

No	Uraian	Jumlah temuan	Tuntas	Belum Tuntas	Belum blm ditindaklanjuti
1	BPK Inspektorat Kabupaten	44	5	23	16
2		763	295	468	-

Sumber data: Evlap 2019

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Kurangnya komitmen SKPD untuk menindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan.
2. Adanya temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti, hal ini disebabkan yang bersangkutan yang terkena rekomendasi meninggal dunia.
3. Petugas yang menindaklanjuti temuan tersebut dipindah tugaskan ke instansi lain.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

1. Dibentuknya program 60 hari untuk pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) terkait LKPD.
2. Koordinasi, evaluasi berkala dan inventarisasi terhadap temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan Tim BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi.
3. Dibentuk Tim untuk mengintensifkan kegiatan tindak lanjut dalam menyelesaikan LHP.

4. Membuat Berita Acara kesepakatan kepada SKPD untuk batas waktu menyelesaikan tindak lanjut.
5. Telah dibentuk Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk penyelesaian tindak lanjut baik temuan Eksternal dan Internal.

Sasaran 6. Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan Evaluasi, Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar 301.962.300.00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.589.544.00 atau 15.10%;

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap (dua) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik
- 2) Persentase SKPD dengan Hasil Reviu ZI Baik

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan	1	Persentase SKPD dengan hasil reviu RB baik	100 %	0	0
	2	Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%	100%	100%

Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik

Tahun 2019, untuk mencapai indicator ini dilakukan melalui kegiatan reviu Reformasi Birokrasi terhadap 10 (sepuluh) SKPD sampel dengan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang meliputi :

- I. Proses
 - a) Manajemen Perubahan;
 - b) Penataan peraturan perundang-undangan;
 - c) Penataan dan penguatan organisasi;
 - d) Penataan tatalaksana;
 - e) Penataan sistem manajemen sdm;
 - f) Penguatan akuntabilitas;
 - g) Penguatan pengawasan;

h) Peningkatan kualitas pelayanan publik;

II. Total pengungkit

a) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi;

b) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN ;

c) Kualitas pelayanan publik;

Dari sampel SKPD yang dinilai tidak ada satupun SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik dengan demikian capaian Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik 0%. Berikut nilai RB 10 Sampel SKPD yang dinilai yang termasuk dalam Reformasi Birokrasi adalah :

Tabel Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2019

SKPD	Nilai	Kriteria
Inspektorat	44,8	C
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	50,71	C C
Dinas Kesehatan	49,22	C
Dinas Perhubungan	50,21	C C
Sekretariat Daerah	52,02	C C
Dinas Komonikasi dan Informatika	45,96	C
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48,75	C
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	50,71	C C
Dinas Penanaman Modal da Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50,01	C C
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,73	C

Sumber Data Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2019.

Berdasarkan mencapai Presentase SKPD dengan hasil Reviu Reformasi Birokrasi Baik tidak tercapai (0%), Karena dari sampel yang dinilai yang dilakukan Penilaian Tidak ada SKPD yang mendapatkan Nilai “Baik”



Kegiatan Reviu RB

Hal-hal yang menjadi kendala :

- 1) Penetapan SKPD sampel dilakukan di Tahun 2019.

Solusi :

- 1) Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pemenuhan dokumen yang menjadi bahan reviu.

Indikator 2 : Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik

Tahun 2019, untuk mencapai indikator ini dilakukan melalui kegiatan reviu Pelaksanaan Zona Integritas terhadap 10 (sepuluh) SKPD sampel yang menangani pelayanan. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Penganangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga diikuti dengan Penganangan dan Penunjukan SKPD yang terpilih sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kecamatan Pelaihari.



Kegiatan penganangan ZIWBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik .

Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
 - 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.
- Berdasarkan sampel SKPD yang dinilai, yang mencapai Presentase SKPD dengan hasil Riviw Zona Integritas Baik tercapai (100%), Karena dari sampel dari 3 SKPD yang dinilai memperoleh nilai "Baik"

Sasaran 7. Meningkatnya Pengelolaan Kelancaran Adminstrasi Perkantoran

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp679.247.400,00 dan terealisasi sebesar Rp615.689.831,00 atau 90,64%,
- 2) Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp139.664.500,00 terealisasi sebesar Rp120.542.072 atau 86,31%,
- 3) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan kegiatan LHKASN dengan anggaran sebesar Rp37.506.000,- tersealisasi sebesar 35.030.000,- atau 93,40%.
- 4) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- tersealisasi sebesar Rp14.705.000,- atau 90,03%;
- 5) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan kegiatan Pengawalan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 775.620.000,- tersealisasi sebesar Rp675.400.000 atau 87,08%;

- 6) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG) dengan sub kegiatan Saber Pungli dengan anggaran sebesar Rp479.270.000,- tersealisasi sebesar Rp479.270.000,- atau 100%;

Tahun 2019 , untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.816.743.390,00 dan terealisasi sebesar Rp 748.486.708,00 atau 91.64%
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.386.582.460,00,- dan terealisasi sebesar Rp 301.387.228,00 atau 77,96%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 (dua) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu.
- 2) Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100%	100	100
	Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100	100

Indikator 1 : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1)

egiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan

tepat waktu meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan administrasi kantor, pencatatan, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.

- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Peralatan Gedung kantor berupa meja kerja, kursi kerja, Perlengkapan Komputer, Alat ukur, Alat Pendingin, Tangga aluminium. PC, Laptop, Printer, Scanner portable, Proyektor portable
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan Gedung kantor yaitu Pengecatan dinding kantor
- 4) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- 5) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Saber Pungli

Indikator 2 : Persentase pengelolaan Kepegawaian dan Perencanaan yang tertib.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1). Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pembayaran TPP berbasis *E – Kita* secara online.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pamarafan absen baik absen masuk dan pulang kantor serta mentaati apel baik apel gabungan hari Senin dan gabungan hari tertentu juga apel setiap hari di kantor.

Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui :
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp3.149.100.00 terealisasi sebesar Rp2.549.400,00 atau 80, 86%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu Predikat SAKIP.

Tahun 2019 Target predikat SAKIP adalah BB, sesuai hasil evaluasi terhadap Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah "A" dengan nilai 86,31.

Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi 5 komponen.

- a) Perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- b) Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi Pelaporan kinerja
- c) Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerjaSedangkan
- d) Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi,
- e) Untuk pencapaian kinerja, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan

Tahun 2018, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (GG) dengan Sub Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran sebesar Rp301.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp296.457.104,- atau 98,40%.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.283.800.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 210.082.200,00 atau 70,85%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 3 (tiga) Indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat.
2. Tingkat Kapabilitas APIP.
3. Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan	1	Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat.	10 (100%)	84	84
	2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,67
	3	Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan	100%	100	100

Indikator 1 : Jumlah pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat

Sesuai dengan target pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat adalah 100% sedangkan teralisasi 84%. Sesuai dengan rencana Diklat Tahun 2019 untuk Diklat yang berhubungan dengan pengawasan yaitu Diklat Sertifikasi Penjenjangan P2UPD dan Diklat Pembentukan P2UPD telah terealisasi, berikut tabel realisasi SDM yang bersertifikat :

Tabel Realisasi Diklat yang bersertifikat Tahun 2019

Uraian	Rencana	Realisasi	%
Auditor Madya	0	0	0
P2UPD Madya	1	0	100
P2UPD Muda	1	1	100
P2UPD Pertama	1	1	100
Auditor Muda	0	0	0
Auditor Terampil	0	0	0

Kendala- kendala dalam melaksanakan indikator ini adalah :

- Jadwal Diklat gagal karena kelas tidak cukup
- Panggilan Peserta Diklat Lambat

Solusi

- Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana Diklat

Rencana Aksi

- Membuat perencanaan Diklat dengan menyesuaikan kalender diklat

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan public. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas, SKPD yang termasuk dalam Zona Integritas.

Untuk tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian terhadap 3 SKPD Yaitu (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kecamatan Pelaihari dan hasil penilaian disampaikan kemenpan untuk mendapat Q.A. Dan dari Q.A Kemenpan telah disepakati 1 (satu) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di Q.A

Tabel Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019

SKPD	Nilai	Kreteria
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	83,572	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,022	-
Kecamatan Pelaihari	75,523	-
Dinas Perhubungan	-	-
Sekretariat Daerah	-	-
Badan Pengelola Keuangan dan Asset	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
Inspektorat	-	-
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-
Dinas Kesehatan	-	-

Sumber data :Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2019



Pembangunan ZI Inspektorat Tanah Laut, 2019



Kegiatan Diklat pengawasan, 2019

Indikator 2. Tingkat Kapasitas Apip

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.283.800.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 210.082.200,00 atau 70,85%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan yang akuntabel Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Data hasil penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah disampaikan ke BPKP Pusat untuk dilakukan *Quality Assurance* yang hasilnya telah terbit dengan nilai 2 atau 66,67%. Berikut tabel hasil penilaian Kapabilitas APIP.

Tabel Nilai Kapabilitas APIP

Target Level	Realisasi	Capaian
3	2	66,67 %

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP

Sesuai hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dalam tahun 2019 telah mencapai pada level 2, dan dari hasil penilaian oleh BPKP Pusat turun dari tahun sebelumnya yaitu pada level 3, dan kedepan levelling APIP akan ditingkatkan.



Kegiatan leveling APIP

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penilaian levelling APIP :

- Kurangnya pemahaman antara Auditor dan P2UPD terkait pelaksanaan pengawasan;
- Belum maksimalnya aparat pengawas dalam pembuatan Kendali Mutu dan pelaksanaan Reviu berjenjang;
- Belum dilaksanakannya secara menyeluruh SOP Pengawasan yang telah diterbitkan;

Solusi :

- Memberikan pemahaman kepada Auditor dan P2UPD terkait pelaksanaan pengawasan;
- Memaksimalkan pelaksanaan PKS terkait pengisian dan pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan memaksimalkan Pelaksanaan Reviu Berjenjang;
- Melakukan pemahaman kepada seluruh APIP untuk selalu memedomani SOP Pengawasan.

Indikator 3 : Presentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.283.800.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 210.082.200,00 atau 70,85%

Sesuai dengan rencana Diklat Tahun 2019 untuk Diklat yang berhubungan dengan pengawasan telah terealisasi 100%, dan juga terdapat diklat yang direncanakan oleh Badan Diklat Kabupaten Tanah Laut yang sifatnya kepesertaan. Berikut diklat yang telah dilaksanakan dalam rangka tercapainya Indikator ini :

- a) Diklat Sertifikasi Penjenjangan P2UPD;
- b) Diklat Pembentukan P2UPD;
- c) Diklat Penilaian angka kredit Pengawas Pemerintah.
- d) Diklat Penilaian Resiko dan Self Assesment;
- e) Diklat Barang/ Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 16 /2018;
- f)Diklat Penyusunan RPJMD;
- g) Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP;
- h) Diklat Reviu RKA;
- i)Diklat Investigasi;
- j)Diklat Reviu LKPD.
- k) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Uji keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar;
- l)Workshop Reviu DAK Fisik;
- m) Workssop Peningkatan Kapabilitas APIP

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019

Tahun **2019** Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 12.101.444.002,30 yang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut table belanja Tidak langsung tahun 2019 :

Tabel Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan tunjangan	3.647.539.560,00	2.501.723.676,00	68,59
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.981.944.392,00	3.269.204.649,00	80,2
	Total	7.629.483.952,00	5.770.928.325,00	74,39

b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2019 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 31 (Tiga puluh satu) kegiatan.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2019 dengan anggaran sebesar 4.471.960.050,00 dengan program sebanyak atas 6 (enam) program yang terdiri atas 31 (Tiga Puluh satu) kegiatan tersebut semua telah terealisasi, Realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
	Total Anggaran	4.471.960.060,00	2.273.161.308,00	50,83
1.	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	<u>816.743.390,00</u>	<u>748.486.708,00</u>	<u>91,64</u>
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	675.000,00	484.000,00	71,70
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.000.000,00	63.181.129,00	70,20
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.014.000,00	22.650.800,00	75,47
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6.750.000,00	2.746.000,00	40,68
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	545.000,00	540.000,00	99,08
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.649.500,00	5.080.600,00	58,74,
	7. Penyediaan jasa alat tulis kantor	36.010.000,00	32.827.000,00	91,16
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	10.799.900,00	10.676.000,00	98,85

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
	9. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5.375.950,00	2.750.000,00	51,15
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	4.645.000,00	4.210.000,00	90,64
	11. Penyediaan makanan dan minuman	36.180.000,00	34.959.500,00	96,63
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	349.041.959,00	99,73
	13. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	32.200.000,00	31.185.000,00	96,85
	14. Penyediaan jasa penunjang SKPD	204.898.140,00	188.154.720,00	91,83
2	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>386.582.460,30</u>	<u>301.387.228,30</u>	<u>77,96</u>
	1. Pengadaan Peralatan gedung kantor	202.890.060,30	188.287.375,00	92,80
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	22.500,00	21.993.725,00	97,75
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	90.211.600,00	63.487.108,00	70,38
	4. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil Operasional	24.980.800,00	8.667.520,00	34,70
	5. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor	46.000.000,00	18,951.500,00	41,20
3	<u>Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan</u>	3.149.100,00	2.549.400,00	80,96
	1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.149.100,00	2.549.400,00	80,96
4.	<u>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (GG)</u>	1.757.087.800,00	395.495.744,00	22,51
	1. Evaluasi Asistensi Sistim Akuntabilitas Kinerja SKPD	301.962.300,00	45.585.544,00	15,10
	2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	460.266.400,00	129.161.200,00	28,06
	3. Saber Pungli	792.638.400,00	185.895.000,00	23,45
	4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	202.220.700,00	34.854.000,00	17,24

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
5	<u>Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</u>	1.179.629.400,00	604.321.328,00	51,23
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	810.714.400,00	497.971.300,00	61,42
	2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah	26.979.500,00	1.837.000,00	6,81
	3. Inventarisasi Temuan Pengawasan	19.301.400,00	778.000,00	4,03
	4. Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan	140.416.100,00	57.497.300,00	40,95
	5. Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan	182.214.000,00	46.327.528,00	25,38
6	<u>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</u>			
	1. Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparaturnya Pengawasan	283.800.700,-	201.082.200,-	70,85%
	2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	44.971.200,-	19.838.700,-	44,11%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAKIP ini. Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah 9 (Sembilan) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 2 (Indikator) indikator dan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Dari 12 (dua belas) indikator kinerja terdapat target yang tidak tercapai sebanyak 5 (lima) buah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KERJA

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2019 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan ke SKPD sesuai dengan PKPT dengan basis resiko;
2. Mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat pencapaian target indikator kinerja hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi lainnya;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
4. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.
5. Meningkatkan kegiatan korektif dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di SKPD.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.

7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaksanaan Zona Integritas Bebas Korupsi dalam Pelayanan Publik
8. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui peningkatan levelling APIP dalam rangka menjamin mutu pengawasan.

Demikian laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja

Pelaihari, 31 Januari 2020

I n s p e k t u r,



H. SUTRISNO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196011281982021003